

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

## PD BPR Bahteramas Kolaka

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496542-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-602671-19042022085324

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bprbahteramas\_kolaka@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-19 08:53:24



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jalan Pramuka No.8 Kel. Lamokato Kec. Kolaka - Sulawesi Tenggara

Nomor Telepon : 04052324130

Penjelasan Umum : Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya Bank Perkreditan Rakyat wajib untuk mengatur, melaksanakan dan melaporkan penerapan tata kelola BPR yang menerapkan tata kelola BPR yang menerapkan prinsip kehati-hatian yang terdiri dari keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi serta kewajaran. PD BPR Bahteramas Kolaka menerapkan aktifitas yang positif dalam implementasi prinsip-prinsip tata kelola (Good Corporate Governance) secara berkesinambungan dan konsisten serta selaras dengan Visi dan Misi BPR, penerapan tata kelola tercermin dalam aktivitas BPR seperti mekanisme Rekrutmen pengurus BPR, training/ sosialisasi, penilaian karyawan, mekanisme penunjukan KAP dan lain-lain terutama yang terkait dengan komitmen Dewan Pengawas dan Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	SAHRIANA	Direktur Utama	1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; 2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang undangan; 3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan Audit dan Rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, Auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, OJK dan/atau Otoritas Lainnya.

## Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Dasar Penunjukan Direksi dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 164 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Kolaka masa Jabatan 2020-2025.

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	WARDI	Komisaris Utama	1.Memastikan terselenggaranya Penerapan tata kelola di seluruh tingkatan/ jenjang organisasi; 2.Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3.Dalam melaksanakan pengawasan wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR; 4.Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali: (a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK BPR; dan (b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 5.Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR; 6.Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, OJK, dan/atau otoritas lainnya.
2	SATBAR	Komisaris	1.Memastikan terselenggaranya Penerapan tata kelola di seluruh tingkatan/ jenjang organisasi; 2.Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3.Dalam melaksanakan pengawasan wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR; 4.Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali: (a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK BPR; dan (b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 5.Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR; 6.Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, OJK, dan/atau otoritas lainnya.

## Rekomendasi Kepada Direksi

Dasar Penunjukan Ketua Dewan Pengawas dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 475 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas PD. BPR Bahteramas Kolaka masa Jabatan 2021-2025 dan anggota Dewan Pengawas dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 274 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas PD. BPR Bahteramas Kolaka masa Jabatan 2021-2025. Setiap anggota Dewan Pengawas PD BPR Bahteramas Kolaka memiliki pengalaman yang luas dan dipilih berdasarkan integritas dan kompetensinya. Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh para pemegang saham melalui RUPS atau RUPS LB dan memenuhi persyaratan OJK melalui fit and proper test.

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SAHRIANA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SAHRIANA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	WARDI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	SATBAR	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	WARDI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	SATBAR	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	88507242	2	88955864
2	Tunjangan	1	229661167	0	0
3	Tantiem	1	43301535	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	1	59824489	0	0
	<b>Total</b>		<b>421294433</b>		<b>88955864</b>

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Besaran Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas disusun berdasarkan Rencana Bisnis Bank, Rencana Bisnis Bank di Setujui dalam RUPS Tahunan. Selain gaji Pokok dan Tunjangan Lainnya Direksi juga menerima Tantiem dan Dana Kesejahteraan. Besaran Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Pengawas disusun berdasarkan Rencana Bisnis Bank, Rencana Bisnis Bank di Setujui dalam RUPS Tahunan. Selain Honor, Dewan Pengawas juga menerima Tantiem.

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PD BPR Bahteramas Kolaka

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Pengganti Sewa Rumah	Tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Sesuai Premi	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pengganti Sewa Rumah Direksi diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 021/SKEP-DIR/BBM.KLK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Tunjangan Perumahan Direksi sebesar Rp1.500.000/ Bulan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	38,79	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	80,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	80,00	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	36,83	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	34,27	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Besaran Gaji Pengurus dan Karyawan disusun berdasarkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara. Gaji Pokok Karyawan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI nomor 30 Tahun 2015, tunjangan Suami/ Istri 10% dari Gaji Pokok, Tunjangan Anak 5% per anak (Maksimal 2 anak) Tunjangan Jabatan maksimal 100% dari Gaji pokok, Tunjangan transport Rp440.000/ bulan, Tunjangan Transport Rp330.000/ bulan. Penyusunan Honorarium dan Tunjangan Direksi disusun dalam Surat Keputusan Direksi nomor 025/SKEP-DIR/BBM.KLK/IX/2020 dan Gaji Pokok & Tunjangan Pegawai nomor 026/SKEP-DIR/BBM.KLK/IX/2020.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	30-04-2021	8	1. Temuan OJK; 2. Penerapan Program APU-PPT
2	19-08-2021	10	1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2021; 2. Kinerja BPR Tahun 2021; 3. Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas BPR; 4. Penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri Kolaka.
3	22-09-2021	8	1. Laporan Kinerja dan pencapaian target di tahun 2021; 2. Upaya Pencapaian Target dan Penurunan NPL ; 3. Upaya Penyelesaian AYDA an. Dewi Yani; 4. Tata tertib dan Kedisiplinan.
4	04-11-2021	9	1. Laporan Kinerja dan pencapaian target di tahun 2021; 2. Upaya Pencapaian Target dan Penurunan NPL ; 3. Upaya Penyelesaian AYDA an. Dewi Yani; 4. Tata tertib dan Kedisiplinan.
5	25-11-2021	8	1. Laporan Penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022; 2. Permasalahan dalam lini kerja dan lingkup kantor; 3. Upaya Penyelesaian AYDA an. Dewi Yani dan H.Muhammad Sabir; 4. Pisah Sambut bersama sdri. Suis Juliani.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	WARDI	5	0	100,00
2	SATBAR	5	0	100,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran Dewan Pengawas BPR telah memenuhi yang dipersyaratkan, Dewan Pengawas juga selalu berperan aktif dalam pengawas BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210422	Kegiatan Sosial	Pasar Murah Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab.Kolaka	Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab.Kolaka	1.000.000
2	20210430	Kegiatan Sosial	Sumbangan Buka Puasa Bersama HUT SULTRA	Sekretariat Prov. Sulawesi Tenggara	577.000
3	20211018	Kegiatan Sosial	Sumbangan Porseni PGRI Kab.Kolaka	PGRI Kab.Kolaka	2.000.000
4	20211125	Kegiatan Sosial	Sumbangan Kontigen HUT PGRI Kec.Kolaka	PGRI Kec.Kolaka	300.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kebijakan Mengenai Pemberian Sumbangan diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 049/SKEP-DIR/BBM.KLK/XI/2017 tentang Biaya Sumbangan, dimana biaya sumbangan diberikan kepada seseorang, sekelompok orang ataupun organisasi atau perusahaan dalam bentuk bantuan atau Hibah. Adapun bentuk Sumbangan seperti Sumbangan Kegiatan Sosial, Sumbangan Keagamaan, Sumbangan kepada pegawai dan Sumbangan Duka Cita.

Nama BPR	: PD BPR Bahteramas Kolaka
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jalan Pramuka No.8 Kel. Lamokato Kec. Kolaka - Sulawesi Tenggara
Nomor Telepon	: 04052324130
Modal Inti BPR	: 18.190.428.319,00
Total Aset BPR	: 37.236.594.536,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,6
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Penerapan Tata Kelola PD. BPR Bahteramas Kolaka Tahun 2021 terdapat kekurangan Pengurus yakni Direktur Operasional sejak Tahun 2020, Pemenuhan anggota Dewan Pengawas BPR berupa pemenuhan kekosongan Direktur Operasional, penyesuaian kebijakan sesuai aturan yang berlaku dan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,84	0,70	0,22	1,76	0.352	
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,67	0,65	0,20	1,52	0.228	
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,70	0,80	0,20	1,70	0.170	
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,60	0,80	0,15	1,55	0.155	
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,20	1,10	0.027	
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,50	0,68	0,20	1,38	0.138	
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,40	0,10	1,50	0.112	
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,60	0,10	1,54	0.115	
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	
Nilai Komposit						1.6	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	BPR hanya memiliki 1 Orang Direksi yaitu Direktur Utama sejak Tahun 2020.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Direksi BPR Bahteramas Kolaka saat ini berdomisili di Kabupaten Kolaka dan memiliki Rumah tempat tinggal sendiri di Kab.Kolaka
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-17/KO.0601/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Hasil Kemampuan dan Kepatutan sdr. SAHRIANA selaku calon Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Kolaka serta Hasil Rapat Umum Pemegang Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020 poin (4)
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 94 Tahun 2017, BPR setiap tahun melaksanakan RUPS dalam rangka Laporan Pertanggungjawaban Direksi kepada Pemegang Saham.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,22	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah Dewan Pengawas BPR Tahun 2021 berjumlah 2 Orang, dimana Ketua Dewan Pengawas di Jabat oleh sdr.WARDI dan Anggota Dewan Pengawas di jabat oleh sdr.SATBAR.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	3	
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-21/KO.0601/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Hasil Kemampuan dan Kepatutan sdr. WARDI selaku calon Ketua Dewan Pengawas PD. BPR Bahteramas Kolaka, Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-6/KO.0601/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Hasil Kemampuan dan Kepatutan sdr. SATBAR selaku calon Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bahteramas Kolaka serta Hasil Rapat Umum Pemegang Saham.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	1 (satu) orang Dewan Pengawas BPR Bahteramas Kolaka bertempat tinggal di Kab.Kolaka dan 1 (Satu) orang Dewan Pengawas BPR Bahteramas Kolaka bertempat tinggal di Kota Kendari.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,63	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,65	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur tentang Penanganan benturan kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 038/SKEP-DIR/BBM.KLK/X/2017 tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Penerapan tata Kelola.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 006/SKEP-DIR/BBM.KLK/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Internal an. Jastrinita Tandi
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	BPR telah memiliki Pedoman terkait Penyelenggaraan Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi 038/SKEP-DIR/BBM.KLK/X/2017 tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Penerapan tata Kelola dan nomor 026/SKEP-DIR/BBM.KLK/XI/2019 tanggal 14 November 2019.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	-
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 026/SKEP-DIR/BBM.KLK/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Struktur Organisasi Audit Internal bertanggung Jawab Langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	-
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	-

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	-
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	-
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	-
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	-
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	-
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	-

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	-
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penunjukan Penugasan KAP telah diputuskan melalui RUPS Tahun 2021 dimana Pemegang Saham mendelegasikan kepada Dewan pengawas untuk menunjuk KAP dengan pertimbangan KAP harus terdaftar di OJK, KAP harus memiliki kompetensi sesuai kompleksitas usaha BPR dan Independensi.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Penunjukan Penugasan KAP telah diputuskan melalui RUPS Tahun 2021 dimana Pemegang Saham mendelegasikan kepada Dewan pengawas untuk menunjuk KAP.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Melaporkan Hasil Audit dan Menejemen Letter kepada OJK paling lambat 30 April setiap tahun dan bersamaan dengan Laporan Keuangan Tahunan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	0
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	0

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 021/SKEP-DIR/BBM.KLK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko an. Neneng Imelda
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR telah memiliki Kebijakan mengenai Prosedur manajemen Risiko yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi nomor 027/SKEP-DIR/BBM.KLK/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 dan Penetapan Limit Risiko Likuiditas yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi nomor 028/SKEP-DIR/BBM.KLK/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	0
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	0

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	0
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	0
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	0
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	0
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	0
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	0
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,71	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,68	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	0
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	0
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	0
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	0
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	0
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	0
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	0

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	0
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	0
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	0
Total nilai skala penerapan		5	
Rata-rata		1,67	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	0
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	0
Total nilai skala penerapan		3	
Rata-rata		1,50	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,60	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	0
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	0
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	0
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	0
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	0
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	0
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	0
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	0
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin


Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kolaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PD. BPR BAHTERAMAS KOLAKA  
TAHUN 2021

Kolaka, 14 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:



**Drs. WARDI, M.Si**  
Ketua Dewan Pengawas



PD. BPR BAHTERAMAS  
KOLAKA



**SAHRIANA, SE**  
Direktur Utama

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Nama BPR : **PD. BPR BAHTERAMAS KOLAKA**  
Alamat : Jalan Pramuka No.8 Kel.Lamokato Kec. Kolaka Kab.Kolaka – Sulawesi Tenggara.  
No Telp : 0405-2324130  
Posisi Laporan : Desember Tahun 2021  
Modal Inti : 18.190.428.319,-  
Total Aset : 37.236.594.536,-  
Status Audit : Di audit  
Bobot BPR : B  
Nilai Komposit : 1,599  
Peringkat Komposit : 1 (Sangat Baik)

**KESIMPULAN**

Penerapan Tata Kelola PD. BPR Bahteramas Kolaka Tahun 2021 terdapat kekurangan Pengurus yakni Direktur Operasional sejak Tahun 2020, Pemenuhan anggota Dewan Pengawas BPR telah terpenuhi. Untuk tahun 2022 BPR akan melakukan pemenuhan pengurus BPR berupa pemenuhan kekosongan Direktur Operasional, penyesuaian kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Kolaka, 14 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:



**Drs. WARDI, M.Si**  
Ketua Dewan Pengawas



PD. BPR BAHTERAMAS  
KOLAKA

**SAHRIANA, SE**  
Direktur Utama